PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2021

CIMAHI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemerintah Daerah Kota Cimahi
Tahun 2021

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang .....

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan 8

BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA KOTA CIMAHI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021 10

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Sampai Dengan Triwulan II 10

2.2 Evaluasi Terhadap Kesesuaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Terhadap APBD Tahun 2021 10

BAB 3 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RENJA BAPPEDA KOTA CIMAHI TAHUN 2021 12

3.1 Rekapitulasi Perubahan Kegiatan Renja Bappeda Tahun 2021.... 12

3.2 Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2021 12

BAB 4 PENUTUP 14

LAMPIRAN 16

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan proses pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil pelaksanaan pembangunan ini tercermin dalam berbagai aspek seperti peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan. Indikator keberhasilan pembangunan daerah adalah semakin meningkatnya daya saing daerah serta makin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia.

Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Secara terminologi, perencanaan pembangunan daerah dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai upaya untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan dengan peluang otonomi seluas-luasnya maka kewenangan diberikan kepada daerah. Hal ini merupakan peluang untuk mengoptimalkan pembangunan dengan ciri khas dan potensi daerah, yang sesuai dengan sumberdaya dan kearifan lokal masyarakat daerah tersebut. Salah satu hal yang mendukung dalam upaya mencapai tujuan pelayanan publik adalah dengan pelaksanaan rencana daerah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif melalui beberapa tahapan perencanaan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan penyusunan perencanaan yang terbagi dalam dua fase, yakni Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya Rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan bahan awal untuk pembahasan dalam musrenbang tingkat Perangkat Daerah sebagai upaya perencanaan partisipatif dengan pendekatan *buttom up* dan *top down* proses dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan *stakeholder* terkait guna menetapkan Rancangan Renja menjadi Renja definitif Perangkat Daerah sebagai bahan masukan untuk penyusunan RKPD Kota Cimahi.

Penyusunan Perubahan Renja BAPPEDA Kota Cimahi Tahun 2021 mengacu pada program strategis daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kota Cimahi Tahun 2021. Perubahan Renja BAPPEDA Kota Cimahi Tahun 2021 telah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 dan Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2017-2022. Hal tersebut seiring dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2021. Selanjutnya, dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian target-target RPJMD Kota Cimahi tahun 2017-2022, khususnya target indikator kinerja daerah pada tahun 2021.

Dengan berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Daerah Kota Cimahi, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan terhadap Renja Bappeda Kota Cimahi Tahun 2021, yang didasarkan pada asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Bappeda Kota Cimahi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Cimahi Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
17. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237);
25. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);
27. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
28. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017–2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 278);
29. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 584);
30. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 603).

31. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2021.

1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan

Perubahan Renja Bappeda Kota Cimahi Tahun 2021, dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan meliputi :

a. Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 serta Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2017-2022 sebagai tindak lanjut terhadap perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
b. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
d. Keadaan Darurat Bencana Wabah Virus Covid-19 yang masih menjadi prioritas daerah dan mengharuskan efisiensi terhadap anggaran setiap Perangkat Daerah di Kota Cimahi;
e. Kebutuhan yang mendesak terkait percepatan penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Transisi Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, bahwa perubahan Renja Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan perubahan RKPD.

Sedangkan dasar pertimbangan perubahan RKPD yang ditindaklanjuti dengan perubahan Renja Perangkat Daerah menurut ketentuan tersebut di atas adalah adanya perubahan pada :

a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
b. Target sasaran pembangunan daerah:
c. Prioritas pembangunan daerah;
d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan
e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA KOTA CIMAHI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Sampai Dengan Triwulan II

Realisasi target kinerja output kegiatan pada Bappeda Kota Cimahi Triwulan II terdapat beberapa capaian, sebagian tercapai sesuai target yaitu untuk kegiatan rutin, sedangkan sebagian masih dalam proses pencapaian target yang direncanakan diukur pada akhir tahun anggaran 2021.

Untuk realisasi anggaran Bappeda Kota Cimahi sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2021 dalam melaksanakan 2 urusan penunjang pemerintahan, 4 program, 16 kegiatan dan 47 sub kegiatan, dengan anggaran belanja operasi sebesar Rp13.638.254.817,-, capaian realisasi keuangan sebesar Rp 5.353.230.081,- atau 39,25%.

Capaian realisasi anggaran triwulan II relatif rendah dikarenakan ada beberapa kegiatan yang masih dalam proses pelaksaaan atau kegiatan yang dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa. Adapun realisasi target kinerja dan anggaran Bappeda Kota Cimahi sampai dengan triwulan II Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagaimana terlampir.

2.2. Evaluasi Terhadap Kesesuaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Terhadap APBD Tahun 2021

2.2.1. Kesesuaian Program Antara Renja Bappeda Kota Cimahi Tahun 2021 dengan APBD Tahun 2021

Berdasarkan evaluasi terhadap program yang ada pada rencana kerja Bappeda dengan APBD Tahun 2021, terdapat kesesuaian 100%, artinya bahwa jumlah program dalam renja seluruhnya dilaksanakan dalam APBD, yaitu terdapat 4 program dalam Renja dan 4 program dalam APBD yang terdiri dari 1 program urusan pendukung pemerintahan, 2 program urusan perencanaan pembangunan serta 1 program penelitian dan pengembangan.

2.2.2. Kesesuaian Kegiatan Antara Renja Bappeda Kota Cimahi Tahun 2021 dengan APBD Tahun 2021

Seperti halnya evaluasi program, untuk kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bappeda dengan APBD tahun 2021 terdapat kesesuaian 100%, yaitu jumlah kegiatan dan sub kegiatan pada Renja sebanyak 16 kegiatan dengan 47 sub kegiatan sesuai dengan 16 kegiatan dengan 47 sub kegiatan yang ada di APBD.

2.2.3. Kesesuaian Pagu Kegiatan Antara Renja Bappeda Kota Cimahi Tahun 2021 dengan APBD Tahun 2021

Untuk anggaran pada dokumen Renja dan APBD, setelah dievaluasi terdapat perbedaan dengan adanya kenaikan anggaran dalam penetapan APBD. Anggaran yang diusulkan dalam Renja Bappeda Tahun 2021 sebesar Rp13.188.303.817,-, sedangkan dalam penetapan APBD 2021 sebesar Rp13.638.254.817,-. Kenaikan anggaran tersebut disebabkan adanya beberapa kegiatan prioritas, khususnya persiapan perencanaan pada masa transisi yang harus dibiayai sehingga berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi kesesuaian program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu kegiatan antara Renja Bappeda Kota Cimahi Tahun 2021 dengan APBD Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.2. di bawah ini :

Tabel 2.2.
Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja Bappeda Kota Cimahi Tahun 2021 dengan APBD 2021

No.	Uraian	Renja Bappeda 2021	APBD 2021
1	Program	4	4
2	Kegiatan	16	16
3	Sub Kegiatan	47	47
4	Pagu Anggaran	Rp.13.188.303.817,-	Rp.13.638.254.817,-

BAB III

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RENJA BAPPEDA KOTA CIMAHI TAHUN 2021

Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Cimahi Tahun 2021 ini memuat tentang kegiatan lanjutan, kegiatan yang dihapus, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

3.1. Rekapitulasi Perubahan Kegiatan Renja Bappeda Tahun 2021

Secara ringkas dari total kegiatan sebanyak 47 sub kegiatan, terdapat 38 sub kegiatan (80,85%) yang mengalami perubahan dan 9 sub kegiatan (19,15%) yang tidak mengalami perubahan anggaran di Perubahan Renja Bappeda Kota Cimahi Tahun 2021. Adapun rincian perubahan kegiatan dalam Perubahan Renja Bappeda Kota Cimahi Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.

Rekapitulasi Perubahan Sub Kegiatan Renja Bappeda Kota Cimahi

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan dalam Renja Perubahan					
		Tetap	Bertambah	Berkurang	Baru	Dihapus	Jumlah
1	Bappeda Kota Cimahi	9	19	19	0	0	47

3.2. Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2021

Kebijakan belanja pada Perubahan Renja Bappeda Kota Cimahi Tahun 2021 diarahkan pada :

1. Pergeseran anggaran antar kegiatan/sub kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja daerah pada tahun 2021;

2. Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah, terutama yang terkait dengan program pemerintah untuk fasilitasi pembangunan infrastruktur dan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 terkait bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota;
3. Penambahan target kinerja terkait penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pada masa transisi kepemimpinan kepala daerah pada tahun 2023-2026, yang menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2021.

Dengan kebijakan belanja tersebut, mengakibatkan perubahan target dan pagu indikatif. Perubahan indikator kinerja juga terjadi sesuai dengan Perubahan RPJMD tahun 2017-2022 serta Perubahan Renstra Bappeda tahun 2017-2022. Perubahan indikator, target kinerja dan pagu indikatif Perubahan Renja Bappeda Kota Cimahi tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.2. sebagaimana terlampir.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Cimahi Tahun 2021 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dan Renstra Bappeda Tahun 2017-2022, maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kota Cimahi Tahun 2021 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Cimahi Tahun 2021;
2. Perubahan RKPD Tahun 2021 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja, maka perlu dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021, yang selanjutnya dijadikan bahan bagi penyusunan Renja periode berikutnya.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Cimahi, 2021

KEPALA BAPPEDA KOTA CIMAHI,

Dr. HUZEN RACHMADI, A.Md, St, SE., M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19630416 198603 1 009

LAMPIRAN

TABEL 2.1.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA CIMAHI
PERIODE PELAKSANAAN S.D. TRIWULAN II TAHUN 2021

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2021)					Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2021)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ket
			RKPD			APBD										
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
			Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					**13,188,303,817**		**13,638,254,817**		**2,376,711,637**		**2,976,518,444**		**5,353,230,081**			
1	**Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase kesuaian program RKPD dengan RPJMD bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persen**	**100**	**361,318,000**	**100**	**979,269,000**		**29,360,631**		**89,528,462**	**0**	**118,889,093**	**0**	**12.1**	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	1	110,605,000	7	316,605,000	0	9,274,877	0	25,891,777	0	35,166,654	0	11.1	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen koordinasi Bidang pemerintahan	Dokumen	1	47,705,100	1	149,527,400	0	6,390,877	0	13,769,277	0	20,160,154	0	13.5	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen Hasil Asistensi bidang pemerintahan	Dokumen	1	15,400,000	1	15,514,500	0	-	0	-	0	-	0	-	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi bidang pemerintahan	Dokumen	1	14,500,000	1	15,563,200	0	-	0	4,347,500	0	4,347,500	0	27.9	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen koordinasi Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	4	12,999,900	2	114,865,900	0	1,134,000	0	4,287,000	0	5,421,000	0	4.7	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Hasil Asistensi Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	2	11,500,000	1	11,500,000	0	1,750,000	0	1,768,000	0	3,518,000	0	30.6	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	2	8,500,000	1	9,634,000	0	-	0	1,720,000	0	1,720,000	0	17.9	
	'Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev Bidang Perekonomian dan SDA	Dokumen	12	105,200,000	6	311,200,000	0	6,976,877	0	25,368,931	0	32,345,808	0	10.4	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen koordinasi Bidang Perekonomian	Dokumen	2	38,600,000	1	143,890,000	0	5,562,677	0	9,852,077	0	15,414,754	0	10.7	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen Hasil Asistensi Bidang Perekonomian	Dokumen	2	4,750,000	1	3,652,500	0	-	0	500,000	0	500,000	0	13.7	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian	Dokumen	2	9,250,000	1	8,057,500	0	-	0	2,085,500	0	2,085,500	0	25.9	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen koordinasi Bidang Sumber Daya Alam	Dokumen	2	37,619,000	1	140,619,000	0	1,414,200	0	8,931,354	0	10,345,554	0	7.4	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen Hasil Asistensi Bidang Sumber Daya Alam	Dokumen	2	5,695,000	1	5,695,000	0	-	0	500,000	0	500,000	0	8.8	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Alam	Dokumen	2	9,286,000	1	9,286,000	0	-	0	3,500,000	0	3,500,000	0	37.7	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	14	145,513,000	7	351,464,000	0	13,108,877	0	38,267,754	0	51,376,631	0	14.6	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen koordinasi Bidang Infrastruktur	Dokumen	4	60,476,600	2	192,862,100	0	-	0	14,225,000	0	14,225,000	0	7.4	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen Hasil Asistensi Bidang Infrastruktur	Dokumen	2	12,069,000	1	12,069,000	0	-	0	-	0	-	0	-	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Infrastruktur	Dokumen	2	43,248,400	1	59,808,400	0	2,914,677	0	9,617,754	0	12,532,431	0	21.0	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD	Jumlah Dokumen koordinasi Bidang Kewilayahan	Dokumen	2	12,850,000	1	12,850,000	0	-	0	2,225,000	0	2,225,000	0	17.3	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2021)					Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2021)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ket
			RKPD			APBD										
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
			Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen Hasil Asistensi Bidang Kewilayahan	Dokumen	2	9,300,000	1	9,300,000	0	-	0	1,500,000	0	1,500,000	0	16.1	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Kewilayahan	Dokumen	2	7,569,000	1	64,574,500	0	10,194,200	0	10,700,000	0	20,894,200	0	32.4	
2	**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**Persentase hasil penelitian yang digunakan untuk perencananaan Pembangunan**	**Persen**	**80**	**302,400,000**	**80**	**417,400,000**		**24,399,400**		**43,468,154**	**0**	**67,867,554**	**0**	**16.3**	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang penyenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan	Dokumen	2	74,571,400	1	88,757,100	0	6,200,000	0	9,600,000	0	15,800,000	0	17.8	
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Dokumen	2	74,571,400	1	88,757,100	0	6,200,000	0	9,600,000	0	15,800,000	0	17.8	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen	4	81,178,100	2	150,878,100	0	6,695,200	0	13,685,077	0	20,380,277	0	13.5	
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	2	67,450,000	1	67,540,000	0	6,695,200	0	10,648,077	0	17,343,277	0	25.7	
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	2	13,728,100	1	83,338,100	0	-	0	3,037,000	0	3,037,000	0	3.6	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi		16	146,650,500	8	177,764,800	0	11,504,200	2	20,183,077	2	31,687,277	25	17.8	
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	(1) Jumlah laporan Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi; (2) Jumlah Sistem yang dibangun	(1) Laporan (2) Sistem	1	37,685,700	1	37,685,700	0	-	0	2,025,000	0	2,025,000	0	5.4	
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	(1) Jumlah Laporan Hasil Kelitbangan yang disosialisasikan dan didiseminasikan; (2) Jumlah Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Daerah	(1) Laporan (2) Kali	1	102,079,100	5	130,193,400	0	10,504,200	2	18,158,077	2	28,662,277	40	22.0	
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah sertifikat Kekayaan Intelektual yang difasilitasi untuk HAKI	Dokumen	12	6,885,700	6	9,885,700	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	10.1	
3	**Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Presentase kesuaian program RKPD dengan RPJMD bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Persen**	**100**	**889,781,967**	**100**	**986,781,967**		**102,313,100**		**102,115,000**	**0**	**204,428,100**	**0**	**20.7**	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan	Dokumen	2	142,673,500	2	222,673,500	0	27,529,200	1	10,880,000	1	38,409,200	50	17.2	
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dokumen	2	142,673,500	2	222,673,500	0	27,529,200	1	10,880,000	1	38,409,200	50	17.2	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi	Dokumen	4	291,572,500	2	291,572,500	0	44,593,100	1	69,300,000	1	113,893,100	50	39.1	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Dokumen yang memanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Dokumen	4	261,610,000	2	261,610,000	0	44,593,100	1	69,300,000	1	113,893,100	50	43.5	
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kota Cimahi	Dokumen	2	29,962,500	1	29,962,500	0	-	0	0	0	-	0	-	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Monev dan pelaporan	Dokumen	10	117,780,000	5	120,780,000	0	13,272,400	1	18,935,000	1	32,207,400	20	26.7	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2021)					Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2021)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ket
			RKPD			APBD										
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
			Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Dokumen	2	32,780,000	1	32,780,000	0	-	0	0	0	-	0	-	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	8	85,000,000	4	88,000,000	0	13,272,400	1	18,935,000	1	32,207,400	25	36.6	
		Persentase musrenbang yang dilaksanakan	**Persen**	**100**	**337,755,967**	**100**	**351,755,967**		**16,918,400**		**3,000,000**	**0**	**19,918,400**	**0**	**5.7**	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah pelaksanaan musrenbang tingkat Kota	Dokumen	4	337,755,967	1	351,755,967	1	16,918,400	0	3,000,000	1	19,918,400	100	5.7	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kali	2	293,051,000	5	307,051,100	5	16,918,400	0	3,000,000	5	19,918,400	100	6.5	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah laporan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Dokumen	1	44,704,967	1	44,704,867	1	-	0	0	1	-	100	-	
4	**Penunjang Urusan Pemeriutah Daerah**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Persen**	**82**	**11,634,803,850**	**81**	**11,254,803,850**		**2,220,638,506**		**2,741,406,828**	**0**	**4,962,045,334**	**0**	**44.1**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev Yang Disusun	Dokumen	28	106,150,000	14	106,150,000	5	23,946,027	4	29,298,477	9	53,244,504	64.285714	50.2	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen renja; 2. Jumlah dokumen renstra 3. Jumlah dokumen anggaran	Dokumen	14	45,708,800	7	93,349,400	2	19,402,027	2	26,848,477	4	46,250,504	57.142857	49.5	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah laporan monev Renja; 2. Jumlah laporan monev renaksi; 3. Jumlah dokumen LKIP; 4. Jumlah dokumen LPPD; 5. Jumlah dokumen LKPJ; 6. Jumlah laporan monev kinerja bulanan; 7. Jumlah dokumen monev Renstra;	Laporan Laporan Dokumen Dokumen Dokumen Laporan Dokumen	14	60,441,200	7	12,800,600	3	4,544,000	2	2,450,000	5	6,994,000	71.428571	54.6	
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi;	**Persen**	**100**	**21,469,000**	**100**	**21,469,000**		-		**15,500,000**	**0**	**15,500,000**	**0**	**72.2**	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Fasilitasi Adminitrasi Kepegawaian	Bulan	24	21,469,000	12	21,469,000	3	-	3	15,500,000	6	15,500,000	50	72.2	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Orang	70	21,469,000	70	21,469,000	0	-	70	15,500,000	70	15,500,000	100	72.2	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	0	0	0											
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut/perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	0	0	0											
		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum;	**Persen**	**100**	**11,507,184,850**	**100**	**11,127,184,850**		**2,196,692,479**		**2,696,608,351**	**0**	**4,893,300,830**	**0**	**44.0**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun	Dokumen	4	10,742,741,650	2	10,242,741,650	1	2,102,667,050	0	2,596,544,579	1	4,699,211,629	50	45.9	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	Orang	50	10,738,226,450	50	10,238,226,450	50	2,102,667,050	50	2,594,407,379	100	4,697,074,429	200	45.9	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	2	2,257,600	1	2,257,600	1	-	0	2,137,200	1	2,137,200	100	94.7	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Dokumen	2	2,257,600	1	2,257,600	0	-	0	-	0	-	0	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Fasilitasi Adminitrasi Umum	Bulan	24	332,584,500	12	326,487,900	3	1,566,000	3	57,194,625	6	58,760,625	50	18.0	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah set peralatan dan perlengkapan kantor; 2. jumlah bulan pemeliharaan peralatan atau perlengkapan kantor;	Bulan	24	50,518,500	12	44,218,500	3	-	3	40,703,000	6	40,703,000	50	92.0	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan logistik kantor	Bulan	24	80,287,600	12	80,287,600	3	-	3	9,750,000	6	9,750,000	50	12.1	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	24	20,278,400	12	20,481,800	3	-	3	2,261,625	6	2,261,625	50	11.0	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	24	6,500,000	12	6,500,000	3	-	3	2,250,000	6	2,250,000	50	34.6	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	24	175,000,000	12	175,000,000	3	1,566,000	3	2,230,000	6	3,796,000	50	2.2	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2021)					Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2021)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ket
			RKPD			APBD										
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
			Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit sewa gudang	Unit	1	77,675,000	1	77,675,000	1	50,000,000	0	-	1	50,000,000	100	64.4	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan fasilitasi sewa gudang	Bulan	24	77,675,000	12	77,675,000	3	50,000,000	3	-	6	50,000,000	50	64.4	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	24	244,543,700	12	370,640,300	3	35,730,552	3	27,577,099	6	63,307,651	50	17.1	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Jumlah bulan penyediaan jasa air. 2. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi; 3. Jumlah bulan penyediaan jasa listrik	Bulan	24	14,000,000	12	14,000,000	3	496,698	3	729,037	6	1,225,735	50	8.8	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	24	157,543,700	12	283,640,300	3	24,108,500	3	7,800,000	6	31,908,500	50	11.2	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	24	73,000,000	12	73,000,000	3	11,125,354	3	19,048,062	6	30,173,416	50	41.3	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	24	109,640,000	12	109,640,000	3	6,728,877	3	15,292,048	6	22,020,925	50	20.1	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.Jumlah bulan pemberian BBM; 2.Jumlah unit kendaraan yang di fasilitasi pembayaran pajak	Bulan Unit	24	109,640,000	12	109,640,000	3	6,728,877	3	15,292,048	6	22,020,925	50	20.1	
													Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)	28.58		
													Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	35.84		
													Predikat Kinerja	Rendah		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan jadwal dan anggaran kas yang ditetapkan, ketersediaan SDM aparatur
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	: Kendala dalam pemilihan penyedia barang/jasa, keterlambatan pencairan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya	:

Cimahi, Juli 2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA CIMAHI

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
BAPPEDA

Dr. HUZEN RACHMADI, A.Md. St., SE., M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630416 198503 1 009

TABEL 3.2.
PERUBAHAN TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF
PERUBAHAN RENJA TAHUN 2021

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	RENJA			APBD		RENJA PERUBAHAN				Pagu Bertambah / (Berkurang) Rp.
1	2	3	4	5			6		7				8
				Satuan	K	Rp	K	Rp	Indikator	Satuan	K	Rp	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						**13,188,303,817**		**13,638,254,817**				**13,635,862,533**	**-2,392,284**
1	**Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras antar tahapan perencanaan**	**Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase kesuaian program RKPD dengan RPJMD bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persen**	**100**	**361,318,000**	**100**	**979,269,000**	**1.Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;** **2.Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persen**	**100**	**659,243,700**	**-320,025,300**
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Dokumen**	**1**	**110,605,000**	**7**	**316,605,000**	**1.Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev RENJA Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;** **2.Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev RENSTRA Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Dokumen** **Dokumen**	**6** **2**	**186,579,900**	**-130,025,100**
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen koordinasi Bidang pemerintahan	Dokumen	1	47,705,100	1	149,527,400	1.Jumlah Dokumen koordinasi RENJA Bidang pemerintahan; 2.Jumlah Dokumen koordinasi RENSTRA Bidang pemerintahan	Dokumen Dokumen	2 1	89,527,400	-60,000,000
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen Hasil Asistensi bidang pemerintahan	Dokumen	1	15,400,000	1	15,514,500	1.Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENJA bidang pemerintahan; 2.Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENSTRA bidang pemerintahan	Dokumen Dokumen	2 1	10,489,500	-5,025,000
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi bidang pemerintahan	Dokumen	1	14,500,000	1	15,563,200	1.Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENJA bidang pemerintahan; 2.Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENSTRA bidang pemerintahan	Dokumen Dokumen	4 1	12,563,200	-3,000,000
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen koordinasi Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	4	12,999,900	2	114,865,900	1.Jumlah Dokumen koordinasi RENJA Bidang Pembangunan Manusia; 2.Jumlah Dokumen koordinasi RENSTRA Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen Dokumen	2 1	53,865,800	-61,000,100
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Hasil Asistensi Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	2	11,500,000	1	11,500,000	1.Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENJA bidang Pembangunan Manusia; 2.Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENSTRA bidang Pembangunan Manusia	Dokumen Dokumen	2 1	11,500,000	0
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	2	8,500,000	1	9,634,000	1.Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENJA bidang Pembangunan Manusia; 2.Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENSTRA bidang Pembangunan Manusia	Dokumen Dokumen	4 1	8,634,000	-1,000,000
									1.Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam **2.Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam**	**Persen**	**100**		

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	RENJA			APBD		RENJA PERUBAHAN				Pagu Bertambah / (Berkurang) Rp.
1	2	3	4	5			6		7				8
				Satuan	K	Rp	K	Rp	Indikator	Satuan	K	Rp	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev Bidang Perekonomian dan SDA**	**Dokumen**	**12**	**105,200,000**	**6**	**311,200,000**	**1.Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev RENJA Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;** **2.Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev RENSTRA Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam**	**Dokumen** **Dokumen**	**6** **2**	**181,199,800**	**-130,000,200**
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen koordinasi Bidang Perekonomian	Dokumen	2	38,600,000	1	143,890,000	1.Jumlah Dokumen koordinasi RENJA Bidang Perekonomian; 2.Jumlah Dokumen koordinasi RENSTRA Bidang Perekonomian	Dokumen Dokumen	2 1	77,187,000	-66,703,000
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen Hasil Asistensi Bidang Perekonomian	Dokumen	2	4,750,000	1	3,652,500	1.Jumlah Dokumen dokumen Hasil Asistensi RENJA Bidang Perekonomian; 2.Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENSTRA Bidang Perekonomian	Dokumen Dokumen	2 1	3,306,500	-346,000
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian	Dokumen	2	9,250,000	1	8,057,500	1.Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENJA bidang Perekonomian; 2.Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENSTRA bidang Perekonomian	Dokumen Dokumen	4 1	5,106,500	-2,951,000
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen koordinasi Bidang Sumber Daya Alam	Dokumen	2	37,619,000	1	140,619,000	1.Jumlah Dokumen koordinasi RENJA Bidang SDA; 2.Jumlah Dokumen koordinasi RENSTRA Bidang SDA	Dokumen Dokumen	2 1	77,468,800	-63,150,200
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen Hasil Asistensi Bidang Sumber Daya Alam	Dokumen	2	5,695,000	1	5,695,000	1.Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENJA bidang SDA; 2.Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENSTRA bidang SDA	Dokumen Dokumen	2 1	6,695,000	1,000,000
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Alam	Dokumen	2	9,286,000	1	9,286,000	1.Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENJA bidang SDA; 2.Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENSTRA bidang SDA	Dokumen Dokumen	4 1	11,436,000	2,150,000
									1.Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan **2.Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persentase**	**100**		
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Dokumen**	**14**	**145,513,000**	**7**	**351,464,000**	**1.Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev RENJA Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;** **2.Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev RENSTRA Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Dokumen** **Dokumen**	**6** **2**	**291,464,000**	**-60,000,000**
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen koordinasi Bidang Infrastruktur	Dokumen	4	60,476,600	2	192,862,100	1.Jumlah Dokumen koordinasi RENJA Bidang Infrastruktur; 2.Jumlah Dokumen koordinasi RENSTRA Bidang Infrastruktur	Dokumen Dokumen	2 1	152,862,100	-40,000,000
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen Hasil Asistensi Bidang Infrastruktur	Dokumen	2	12,069,000	1	12,069,000	1.Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENJA bidang Infrastruktur; 2.Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENSTRA bidang Infrastruktur	Dokumen Dokumen	2 1	7,069,000	-5,000,000
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Infrastruktur	Dokumen	2	43,248,400	1	59,808,400	1.Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENJA bidang Infrastruktur; 2.Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENSTRA bidang Infrastruktur	Dokumen Dokumen	4 1	44,808,400	-15,000,000

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	RENJA			APBD		RENJA PERUBAHAN				Pagu Bertambah / (Berkurang) Rp.
1	2	3	4	5			6		7				8
				Satuan	K	Rp	K	Rp	Indikator	Satuan	K	Rp	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD	Jumlah Dokumen koordinasi Bidang Kewilayahan	Dokumen	2	12,850,000	1	12,850,000	1.Jumlah Dokumen koordinasi RENJA Bidang Kewilayahan; 2.Jumlah Dokumen koordinasi RENSTRA Bidang Kewilayahan	Dokumen Dokumen	2 1	12,850,000	0
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen Hasil Asistensi Bidang Kewilayahan	Dokumen	2	9,300,000	1	9,300,000	1.Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENJA bidang Kewilayahan; 2.Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENSTRA bidang Kewilayahan	Dokumen Dokumen	2 1	9,300,000	0
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Kewilayahan	Dokumen	2	7,569,000	1	64,574,500	1.Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENJA bidang Kewilayahan; 2.Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi	Dokumen Dokumen	4 1	64,574,500	0
		Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	**Presentase kesuaian program RKPD dengan RPJMD bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Persen**	**100**	**889,781,967**	**100**	**986,781,967**	**Presentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD**	**Persen**	**100**	**1,062,937,300**	**76,155,333**
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan**	**Dokumen**	**2**	**142,673,500**	**2**	**222,673,500**	**Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan**	**Dokumen**	**3**	**369,770,000**	**147,096,500**
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dokumen	2	142,673,500	2	222,673,500	Jumlah Dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dokumen	3	369,770,000	147,096,500
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	**Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi**	**Dokumen**	**4**	**291,572,500**	**2**	**291,572,500**	**Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi**	**Dokumen**	**2**	**319,355,000**	**27,782,500**
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Dokumen yang memanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Dokumen	4	261,610,000	2	261,610,000	Jumlah Dokumen yang memanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Dokumen	2	305,000,000	43,390,000
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kota Cimahi	Dokumen	2	29,962,500	1	29,962,500	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kota Cimahi	Dokumen	1	14,355,000	-15,607,500
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Jumlah Dokumen Monev dan pelaporan**	**Dokumen**	**10**	**117,780,000**	**5**	**120,780,000**	**Jumlah Dokumen Monev dan pelaporan**	**Dokumen**	**3**	**126,001,000**	**5,221,000**
		Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Dokumen	2	32,780,000	1	32,780,000	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Dokumen	12	28,800,000	-3,980,000
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	8	85,000,000	4	88,000,000	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	9	97,201,000	9,201,000
2	**Meningkatnya peran litbang dalam perencanaan pembangunan daerah**	**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**Persentase hasil penelitian yang digunakan untuk perencananaan Pembangunan**	**Persen**	**80**	**302,400,000**	**80**	**417,400,000**	**Persentase penelitian yang dihasilkan**	**Persen**	**100**	**522,138,000**	**104,738,000**
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang penyenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan**	**Dokumen**	**2**	**74,571,400**	**1**	**88,757,100**	**Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang penyenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan**	**Dokumen**	**3**	**81,257,100**	**-7,500,000**
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Dokumen	2	74,571,400	1	88,757,100	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Dokumen	3	81,257,100	-7,500,000
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Dokumen**	**4**	**81,178,100**	**2**	**150,878,100**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Dokumen**	**4**	**153,878,100**	**3,000,000**
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	2	67,450,000	1	67,540,000	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	1	67,540,000	0
		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	2	13,728,100	1	83,338,100	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	86,338,100	3,000,000
									Persentase pertumbuhsn inovasi	**Persen**	**10**		
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Dokumen**	**16**	**146,650,500**	**8**	**177,764,800**	**Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Dokumen**	**8**	**287,002,800**	**109,238,000**

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	RENJA			APBD		RENJA PERUBAHAN				Pagu Bertambah / (Berkurang) Rp.
1	2	3	4	5			6		7				8
				Satuan	K	Rp	K	Rp	Indikator	Satuan	K	Rp	
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	(1) Jumlah laporan Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi; (2) Jumlah Sistem yang dibangun	(1) Laporan (2) Sistem	1	37,685,700	1	37,685,700	1.(Jumlah dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi; 2.Jumlah Sistem yang dibangun	Dokumen Sistem	2 1	48,585,700	10,900,000
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	(1) Jumlah Laporan Hasil Kelitbangan yang disosialisasikan dan didiseminasikan; (2) Jumlah Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Daerah	(1) Laporan (2) Kali	1	102,079,100	5	130,193,400	1.Jumlah Dokumen Hasil Kelitbangan yang disosialisasikan dan didiseminasikan; 2.Jumlah Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Daerah; 3.Jumlah fasilitasi pengukuran indeks lingkup kelitbangan	Dokumen Dokumen Dokumen	2 1 4	228,531,400	98,338,000
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah sertifikat Kekayaan Intelektual yang difasilitasi untuk HAKI	Dokumen	12	6,885,700	6	9,885,700	Jumlah dokumen Sertifikat HAKI	Dokumen	6	9,885,700	0
3	**Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan**	**Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Persentase musrenbang yang dilaksanakan**	**Persen**	**100**	**337,755,967**	**100**	**351,755,967**	**Persentase tahapan kegiatan musrenbang yang dilaksanakan**	**Persen**	**100**	**247,811,300**	**-103,944,667**
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Jumlah pelaksanaan musrenbang tingkat Kota**	**Dokumen**	**4**	**337,755,967**	**1**	**351,755,967**	**Jumlah pelaksanaan musrenbang tingkat Kota**	**Dokumen**	**1**	**247,811,300**	**-103,944,667**
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kali	2	293,051,000	5	307,051,100	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kali	5	237,211,300	-69,839,800
		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah laporan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Dokumen	1	44,704,967	1	44,704,867	Jumlah laporan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Dokumen	1	10,600,000	-34,104,867
4	**Terwujudnya tatakelola kinerja perangkat daerah**	**Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Persen**	**82**	**11,634,803,850**	**81**	**11,254,803,850**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Persen**	**81**	**11,391,543,533**	**136,739,683**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev Yang Disusun**	**Dokumen**	**28**	**106,150,000**	**14**	**106,150,000**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev Yang Disusun**	**Dokumen**	**14**	**126,789,800**	**20,639,800**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen renja; 2. Jumlah dokumen renstra 3. Jumlah dokumen anggaran	Dokumen	14	45,708,800	7	93,349,400	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	7	108,769,200	15,419,800
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah laporan monev Renja; 2. Jumlah laporan monev renaksi; 3. Jumlah dokumen LKIP; 4. Jumlah dokumen LPPD; 5. Jumlah dokumen LKPJ; 6. Jumlah laporan monev kinerja bulanan; 7. Jumlah dokumen monev Renstra;	Laporan Laporan Dokumen Dokumen Dokumen Laporan Dokumen	14	60,441,200	7	12,800,600	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	24	18,020,600	5,220,000
			Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi;	**Persen**	**100**	**21,469,000**	**100**	**21,469,000**	**Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi;**	**Persen**	**100**	**48,924,000**	**27,455,000**
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Bulan Fasilitasi Adminitrasi Kepegawaian**	**Bulan**	**24**	**21,469,000**	**12**	**21,469,000**	**Jumlah Bulan Fasilitasi Adminitrasi Kepegawaian**	**Bulan**	**12**	**48,924,000**	**27,455,000**
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Orang	70	21,469,000	70	21,469,000	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Orang	70	48,924,000	27,455,000
			Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum;	**Persen**	**100**	**11,507,184,850**	**100**	**11,127,184,850**	**Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi**	**Persen**	**100**	**11,215,829,733**	**88,644,883**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun**	**Dokumen**	**4**	**10,742,741,650**	**2**	**10,242,741,650**	**Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun**	**Dokumen**	**2**	**10,255,078,933**	**12,337,283**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	Orang	50	10,738,226,450	50	10,238,226,450	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	Orang	50	10,238,285,733	59,283
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	2	2,257,600	1	2,257,600	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	1	2,257,600	0
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Dokumen	2	2,257,600	1	2,257,600	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Dokumen	1	14,535,600	12,278,000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Bulan Fasilitasi Administrasi Umum**	**Bulan**	**24**	**332,584,500**	**12**	**326,487,900**	**Jumlah Bulan Fasilitasi Administrasi Umum**	**Bulan**	**12**	**388,800,000**	**62,312,100**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah set peralatan dan perlengkapan kantor; 2. jumlah bulan pemeliharaan peralatan atau perlengkapan kantor;	Bulan	24	50,518,500	12	44,218,500	1. Jumlah set peralatan dan perlengkapan kantor; 2. Jumlah bulan pemeliharaan peralatan atau perlengkapan kantor;	Bulan	12	101,400,600	57,182,100

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	RENJA			APBD		RENJA PERUBAHAN				Pagu Bertambah / (Berkurang) Rp.
1	2	3	4	5			6		7				8
				Satuan	K	Rp	K	Rp	Indikator	Satuan	K	Rp	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan logistik kantor	Bulan	24	80,287,600	12	80,287,600	Jumlah bulan penyediaan logistik kantor	Bulan	12	71,017,000	-9,270,600
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	24	20,278,400	12	20,481,800	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	12	20,758,400	276,600
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	24	6,500,000	12	6,500,000	Jumlah bulan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	20,500,000	14,000,000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	24	175,000,000	12	175,000,000	Jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	175,124,000	124,000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah unit sewa gudang**	**Unit**	**1**	**77,675,000**	**1**	**77,675,000**	**Jumlah unit sewa gudang**	**Unit**	**1**	**77,675,000**	**0**
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan fasilitasi sewa gudang	Bulan	24	77,675,000	12	77,675,000	Jumlah bulan fasilitasi sewa gudang	Bulan	12	77,675,000	0
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bulan**	**24**	**244,543,700**	**12**	**370,640,300**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bulan**	**12**	**380,995,800**	**10,355,500**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. jumlah bulan penyediaan jasa air. 2. jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi; 3. Jumlah bulan penyediaan jasa listrik	Bulan	24	14,000,000	12	14,000,000	1. Jumlah bulan penyediaan jasa air. 2. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi; 3. Jumlah bulan penyediaan jasa listrik	Bulan	12	14,000,000	0
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	24	157,543,700	12	283,640,300	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	261,807,600	-21,832,700
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	24	73,000,000	12	73,000,000	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	105,188,200	32,188,200
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bulan**	**24**	**109,640,000**	**12**	**109,640,000**	**Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bulan**	**12**	**113,280,000**	**3,640,000**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah bulan pemberian BBM; 2. Jumlah unit kendaraan yang di fasilitasi pembayaran pajak	Bulan Unit	24	109,640,000	12	109,640,000	1. Jumlah bulan pemberian BBM; 2. Jumlah unit kendaraan yang difasilitasi pemeliharaan, pembayaran pajak dan perijinan	Bulan Unit	12 3	113,280,000	3,640,000